

ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian di Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat, hambatan dan solusinya agar pandangan masyarakat tentang penegakan di bidang Hukum Administrasi Negara yang sangat lemah dan tidak berpihak kepada para pencari keadilan. Penggugat merupakan pihak yang lemah tak berdaya dibandingkan dengan kekuasaan aparatur penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh badan atau Pejabat TUN yang mempunyai kewenangan membuat keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Adapun hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : yang pertama, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pandangan antara Tergugat (Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal) dengan putusan hakim PTUN, karena legalitas Tergugat dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Tugas terhadap

Penggugat, Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Penggugat sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua : Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap adalah sebagai berikut : pertimbangan hukum hakim kurang tepat karena mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, secara substansi hukum, Undang-Undang PERATUN tidak tuntas mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara baik dalam Hukum Acara maupun Hukum Materiilnya, rendahnya ketaatan dan kepatuhan hukum Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun demikian Penggugat juga seharusnya harus menghormati proses peradilan TUN sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Solusi dari hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan hakim PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : kecermatan hakim PTUN yang memeriksa sengketa TUN dalam menerapkan hukum karena penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan lapangan hukum publik sangat luas, perlunya peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara terutama dalam hal upaya paksa yang ditujukan kepada Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat TUN, Kepatuhan para pihak terhadap proses peradilan TUN sangat menunjang pelaksanaan putusan PTUN terutama Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan.

Kata kunci : Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum

ABSTRACT

This thesis research aims to investigate the implementation of the decision of the dispute staffing in the Department of Education, Youth and Sports Tegal already legally binding is not yet implemented by the Defendant, barriers and solutions so that people's views of enforcement in the field of Administrative Law is very weak and does not siding with those seeking justice. Plaintiff is the weaker party powerless compared to the power apparatus of government administration is carried out by officials submit their bodies TUN who has the authority to make decisions that are concrete, individual and final.

This study uses normative juridical approach, the approach that uses legis positivist concept which states that the law is identical with the norms made written and enacted by institutions or authorities. In addition, this concept of viewing the law as a normative system of autonomous, closed and apart from public life.

The research results to the authors convey is as follows: first, Court decision that has the force of law still could not be implemented due to disagreements between the Defendant (Head Office Dikpora Tegal) with the judge's ruling administrative court, since the legality of the Defendant considered to have no authority to issue letter of Assignment to the Plaintiff, the Defendant in issuing the decision of the State Administrative addressed to the Plaintiff has been based on the legislation in force, both: barriers affecting the implementation of the verdict has been finalized is as follows: the legal considerations of the judge is not appropriate because basing on the legislation that is inconsistent with the fact that existing laws, in the substantive law and not exhaustive of the Administrative law OF regulate the implementation of the dispute resolution both in the State Administrative Procedure law and the law to the material, the low adherence to and compliance with the law in carrying out the decision of the Defendant have legally binding but nevertheless Plaintiffs should also have to respect the judicial process TUN until the decision of the judge who finalized. The solution of the obstacles affecting the implementation of the decision of the judge administrative court which has legally binding are as follows: austerity judge administrative court examining disputes TUN in applying the law because governance is a field of public law is very broad, the necessity of implementing regulations of a technical nature in the implementation of the Act - State Administrative Law, especially in the case of forceful measures addressed to the Defendant, which owns Agency or official TUN, Compliance of the parties of the judicial process TUN strongly support the implementation of the decision of the Administrative court, especially the Defendant as government administrators.

Keywords: juridical control, Legal Compliance is the main requirement of law enforcement